

TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI PERTANIAN SAAT INI DAN MASA DATANG: PENERAPAN KONSEP *LINK AND MATCH*

Muslimin Mustafa

I. PENDAHULUAN

Seluruh propinsi di Indonesia memiliki pendidikan tinggi formal, baik pada Strata I maupun D3 yang tersebar pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Diperkirakan setiap tahunnya menghasilkan 7.000-10.000 sarjana pertanian. Para alumni pendidikan tinggi pertanian tersebut pada umumnya dianggap memiliki dasar pengetahuan pertanian yang seragam dan setingkat karena kurikulum pada setiap pendidikan tinggi pertanian mengacu pada kurikulum yang disepakati oleh Konsorsium Ilmu-ilmu Pertanian. Walaupun demikian, karena materi baik dari calon sarjana yang dibina maupun lingkungan dari setiap pendidikan tinggi pertanian adalah berbeda maka terjadi perbedaan kemampuan dari pengelola sarjana pertanian yang dihasilkan oleh setiap pendidikan tinggi pertanian di Indonesia.

Faktor lain yang berpengaruh pada produk yang dihasilkan adalah letak fisik geografi yang sangat berbeda dan memberikan dampak terhadap perkembangan wawasan dan pengalaman, terutama pada pihak pengelola (dosen) dari pendidikan tinggi pertanian di Indonesia saat ini. Keadaan lain yang berkaitan dengan letak geografi tersebut adalah kurang relevansinya kurikulum dasar pertanian dengan lingkungannya dan sumberdaya alam dari suatu wilayah dari perguruan tinggi pertanian tersebut berada.

Perbedaan materi dasar pertanian dengan potensi dan lingkungan sumberdaya alam yang kurang relevan tersebut menyebabkan sebagian daripada alumni pendidikan pertanian tersebut mengalami hambatan dalam berpartisipasi pada suatu pembangunan pertanian baik secara wilayah maupun secara nasional. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama beras sejak Repelita V telah mengubah arah kebijakan yang berorientasi kuantitatif ke kualitatif, terutama pada efisiensi pemanfaatan lahan secara efektif dengan nilai tambah yang lebih tinggi; tanpa mengurangi batas produksi cadangan nasional.

Perubahan orientasi ini menuntut adanya penyesuaian pada program pendidikan tinggi pertanian yang lebih luwes dan lebih pragmatis. Namun, perlu

pula ditekankan bahwa pendidikan tinggi pertanian harus mengacu pada program pendidikan nasional sesuai dengan GBHN 1993.

Dalam GBHN 1993 dikemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Dalam pada itu, GBHN 1993 telah menetapkan butir-butir kebijaksanaan pembangunan pendidikan tinggi dalam Repelita VI, yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan program-program prioritas pendidikan tinggi pertanian sebagai berikut:

- (1) Membina dan mengembangkan pendidikan tinggi untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kepemimpinan, yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, mengembangkan kehidupan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Menguasai pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan kegiatan mahasiswa dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesionalnya dengan mendorong pengembangan wadah disiplin keilmuan; mengembangkan iklim yang demokratis untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan.

Dengan demikian, pada jenjang pendidikan tinggi, ada dua dimensi tujuan pendidikan yang diwakili dalam istilah kemampuan “akademik” dan “profesional”. Kemampuan akademik pendidikan tinggi pertanian menekankan kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional pertanian menekan kemampuan dan keterampilan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi ini, lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk lebih mengarahkan peserta didik untuk menguasai iptek, dan secara kelembagaan, riset dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perlu mendapat perhatian.

II. ANALISIS PERMASALAHAN

Dengan mengacu pada GBHN 1993 tentang pendidikan tinggi maka alumni pendidikan tinggi pertanian seyogyanya mampu berpartisipasi dan diakomodasi dalam berbagai pembangunan khususnya di bidang pembangunan pertanian serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan iptek saat ini. Namun, perbedaan dalam proses pendidikan yang dipengaruhi oleh lingkungan lokasi, sumberdaya manusia menunjukkan tidak terjadinya *link and match* antara kebanyakan alumni pendidikan tinggi pertanian dengan program pembangunan yang ada. Walaupun secara nyata belum ada keluhan yang serius tentang adanya sarjana pertanian yang menganggur, namun permintaan untuk menjadi pegawai negeri pada departemen pemerintah menunjukkan *list* yang panjang.

Kurang serasinya *link and match* terhadap alumni pendidikan tinggi pertanian dengan kebutuhan masyarakat terutama pada awal PJP-II ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- (1) Kurikulum dasar pertanian dan penunjangnya yang kurang fleksibel menghadapi perubahan-perubahan mendasar dalam pembangunan pertanian di Tanah Air serta dunia sebagai akibat kemajuan iptek khususnya di bidang bioteknologi dan rekayasa engineering yang diperlukan dalam bidang pertanian.
- (2) Perkembangan agroindustri dan agribisnis yang memerlukan kajian yang lebih multidisipliner.
- (3) Globalisasi dalam bidang informasi, masyarakat luas (terutama yang berpendidikan) memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan dan termotivasi secara mandiri untuk menerapkan iptek seperti di bidang pertanian. Hal ini mengurangi kesempatan para alumni pendidikan tinggi pertanian yang terikat oleh kurikulum formal.
- (4) Perkembangan ekonomi wilayah serta perubahan pusat-pusat pengembangan, munculnya pusat perdagangan baru dan perubahan komoditas andalan dari suatu wilayah.
- (5) Arah pembangunan nasional yang mengurangi peran utama sektor pertanian ke sektor lain (jasa, industri, dan sebagainya).

Kesulitan program pendidikan tinggi pertanian untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut, antara lain disebabkan oleh:

- Sarana dan prasarana pendukung yang terbatas baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- Sumberdaya manusia yang serba terbatas oleh lingkungan, kemampuan serta kesempatan.

- Keadaan/lokasi dari pendidikan tinggi pertanian yang tersebar di Tanah Air terutama yang jauh dari pusat-pusat pengembangan.

Pada beberapa pendidikan tinggi pertanian khususnya di wilayah barat (Jawa) sudah lama mengantisipasi masalah-masalah tersebut di atas dan dengan ditunjang oleh ilmu penunjang yang cukup kuat dan memadai (komputer), ditambah dengan pendidikan tambahan singkat, mereka kenyataannya mampu berkiprah pada bidang-bidang nonpertanian secara langsung seperti perbankan, media cetak, dan lain-lain.

Keadaan yang sama juga terjadi pada program pasca sarjana, sebagian alumni pendidikan tinggi pertanian beralih ke bidang-bidang keahlian yang tidak mendukung iptek pertanian secara langsung seperti program lingkungan hidup, perencanaan pembangunan wilayah, dan sebagainya. Di samping itu munculnya program pendidikan MBA telah banyak menarik para alumni pendidikan tinggi pertanian yang juga kurang relevan dengan pembangunan bidang pertanian secara langsung.

III. POTENSI DAN PELUANG

Berbagai masalah yang dihadapi pendidikan tinggi pertanian di Indonesia seperti dikemukakan di atas adalah juga sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan tinggi pertanian Indonesia memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan secara kreatif dan efektif. Potensi dan peluang tersebut antara lain adalah:

- (1) Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang akan datang, dapat juga dikatakan sebagai era percepatan pembangunan di segala bidang termasuk bidang pertanian dengan agroindustri dan agribisnis sebagai inti yang membutuhkan ruang gerak yang fleksibel sehingga kebijaksanaan ini dapat dimanfaatkan secara kreatif dalam memacu perkembangan pendidikan tinggi pertanian yang lebih terarah pada kebutuhan pembangunan di sektor pertanian.
- (2) Sejalan dengan itu, sebagai pedoman dalam GBHN 1993 pengembangan pendidikan tinggi pertanian harus didukung oleh jumlah dan mutu tenaga akademik yang tersedia, yang dapat dilakukan dengan mempercepat pendidikan tambahan serta memberikan peluang yang berarti terutama pada pendidikan tinggi pertanian di kawasan tertinggal.
- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan era pengembangan iptek terutama yang menunjang pembangunan bioteknologi pertanian.
- (4) Memberikan peluang pada beberapa perguruan tinggi pertanian di kawasan tertinggal untuk menentukan programnya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Merangsang pemerintah setempat untuk membantu/memberikan ruang lingkup yang menciptakan inovasi pada pendidikan tinggi pertanian setempat.

IV. KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM

4.1 Arah dan Strategy Kebijakan

Sesuai dengan amanat GBHN 1993, dan hasil pengkajian terhadap pembangunan pendidikan selama PJP-I, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan empat strategy dasar pendidikan untuk Pelita VI, yaitu pemerataan untuk memperoleh pendidikan, relevansi, peningkatan kualitas, dan efisiensi. Keempat strategy dasar tersebut haruslah juga sekaligus menjadi strategy dasar pengembangan pendidikan tinggi pertanian di Indonesia.

Strategy dasar tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk strategy dasar implementasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam program atau rencana tindakan, setelah disesuaikan dengan keadaan, perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi pertanian sekarang ini.

Dalam kaitan dengan strategy dasar tersebut, maka perlu digarisbawahi mengenai kebijaksanaan *link and match* atau keterkaitan dan kesepadanan, yang merupakan kebijakan pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan maksud untuk meningkatkan keterkaitan antara pendidikan dan dunia pembangunan.

4.2 Sasaran yang Hendak Dicapai

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan pendidikan tinggi pertanian di Indonesia adalah mencetak ahli pertanian (alumni pertanian) yang mampu mengikuti setiap perubahan pembangunan pertanian dan pengembangan iptek yang handal, sehingga para alumni dapat mengisi program pembangunan pertanian yang berkembang pesat di Tanah Air dan dunia internasional.

4.3 Prioritas Program

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka program pendidikan tinggi pertanian yang akan datang akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Melanjutkan upaya meningkatkan mutu keluaran pendidikan tinggi pertanian, yang akan dicapai melalui program-program kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu tenaga akademik yang tersedia melalui berbagai macam program pendidikan lanjutan di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, baik jumlah maupun mutunya.
 - c. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif.
 - d. Meningkatkan kerja sama dengan bidang lain, dunia usaha dan industri.
 - e. Memperkuat kegiatan keterampilan, penguasaan masalah dan meningkatkan kemandirian, serta kemampuan integrasi.
 - f. Menyesuaikan kurikulum dengan arah pembangunan pertanian dan pengembangan iptek khususnya menyangkut pada agroindustri, agribisnis dan bioteknologi.
- (2) Meningkatkan peranan dan kontribusi pendidikan tinggi pertanian bagi suksesnya pembangunan nasional, terutama pembangunan pertanian secara luas melalui program-program kegiatan:
- a. Meningkatkan pengkajian-pengkajian pembangunan regional yang berkaitan dengan agroindustri dan agribisnis.
 - b. Mengembangkan bank data pada setiap wilayah.
 - c. Pengembangan kerja sama dengan sektor lain dan bidang lain.
 - d. Peningkatan keterkaitan dan kesepadanan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan pembangunan pada wilayah/kawasan tertinggal.
- (3) Penciptaan kehidupan kampus sebagai masyarakat akademik yang berwibawa yang akan diwujudkan melalui program-program:
- a. Pelaksanaan tradisi-tradisi akademik secara dinamis.
 - b. Penciptaan lingkungan kampus yang asri yang menunjang kehidupan akademik yang dinamis.
 - c. Penggalakan penulisan buku dan karya ilmiah, seminar, simposium, stadium general, dan lain-lain.
- (4) Meningkatkan peran pendidikan tinggi pertanian sebagai lembaga riset dengan melalui program-program sebagai berikut:
- a. Pembangunan fasilitas riset Pusat Kegiatan Penelitian.
 - b. Peningkatan kegiatan riset untuk keperluan pembangunan dan untuk pengembangan ilmu.
 - c. Penyusunan *research tree* dan implementasinya secara konkrit.
- (5) Peningkatan pengembangan kemahasiswaan lebih dini yang dapat mendorong kreativitas dan kematangan pribadi yang bertanggung jawab, melalui program-program sebagai berikut:
- a. Peningkatan pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa yang lebih bersifat multidisiplin.

- b. Peningkatan lembaga profesi mahasiswa melalui himpunan-himpunan, dan sebagainya.

V. PENUTUP

Demikian pokok-pokok pikiran mengenai tantangan pendidikan tinggi pertanian untuk masa kini dan yang akan datang dan kaitannya dengan *link and match*. Tantangannya sangat kompleks, namun program-program pendidikan tinggi pertanian sekarang dapat menjadi rujukan yang sangat berguna dalam mengkaji dan merumuskan program-program kurikulum yang dapat mengimplementasikan *link and match* pada pendidikan tinggi pertanian di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Riset Nasional, 1993. Program Utama Nasional Riset dan Teknologi dalam Pembangunan Lima Tahun VI, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 0134/O/93 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin, Jakarta.
- Panitia Rapat Kerja Nasional, 1993. Laporan Tahunan Direktorat Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Panitia Rapat Kerja Nasional, 1993. Link and Match. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.